

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber pendanaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal pemerintahan maupun pembangunan sangat dibutuhkan semenjak adanya otonomi daerah di Indonesia, mulai 1 Januari 2001 (Siahaan, 2008). Pelaksanaan otonomi daerah yang mana pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No 8 tahun 2005 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan kewenangan atas dasar desentralisasi diperlukannya sumber-sumber pembiayaan yang mana terdapat pada Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, termasuk untuk mengelola keuangan daerah terutama pendapatan daerah (Rosidin, 2010).

Sri Mulyani (2017) mengatakan bahwa, negara memiliki tiga sumber APBN yang tertinggi, yaitu dari pendapatan pajak Rp 1.498 triliun, pendapatan bukan pajak Rp 250 triliun, serta hibah Rp 1,4 triliun. Pajak merupakan faktor utama dalam menunjang pembangunan sebesar 75 persen. Erzaldi Rozman (2018) mengemukakan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi dalam mengembangkan usaha perdagangan dan pariwisata. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada tahun 2000 dari

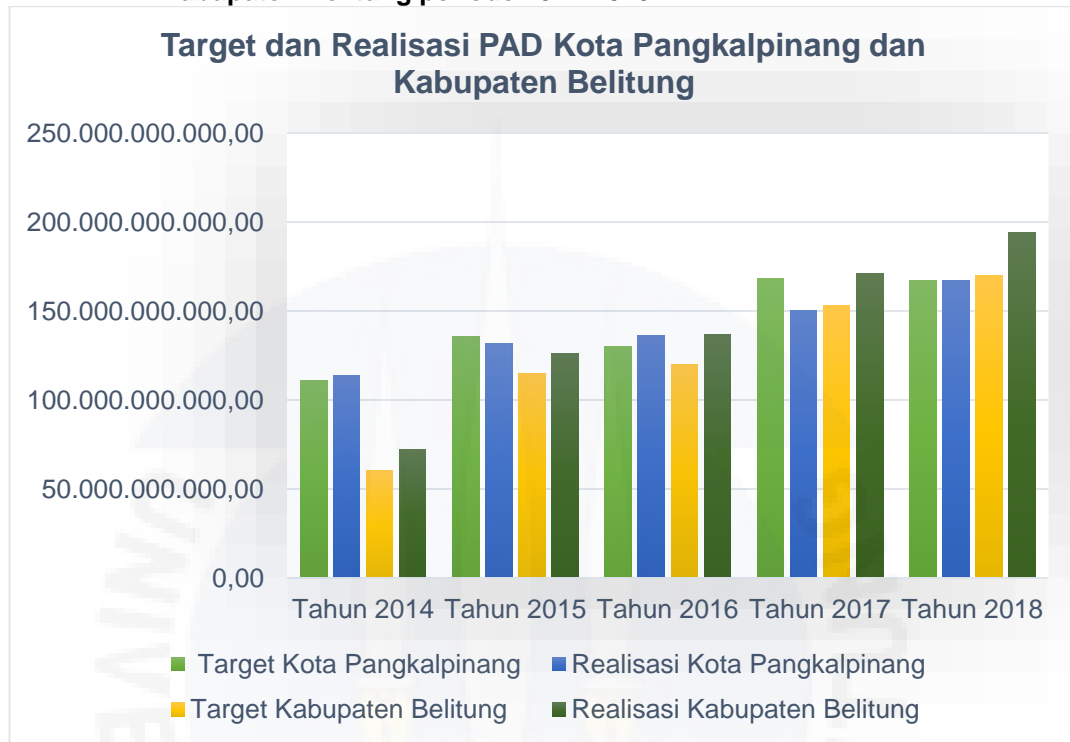
hasil pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi dua pulau utama, Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pusat kota di Pulau Bangka berada di Kota Pangkalpinang sedangkan Pusat kota di Pulau Belitung berada di Kabupaten Belitung. Sebagai pusat kota di dua pulau utama Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung tentunya mempunyai kemungkinan yang lebih besar dikunjungi terlebih dahulu oleh wisatawan yang ingin berkunjung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peluang keunggulan lokal dan sumber daya regional dan global sehingga akan memberikan dampak bagi pembangunan Indonesia. Selain potensi lokal dan sumber daya alam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki lokasi yang strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pemerintah telah menyusun strategi dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pembangunan nasional serta dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melakukan upaya efektivitas serta efisiensi terhadap pajak daerah merupakan cara dalam hal peningkatan PAD. Seperti daerah lain di Indonesia, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung merupakan daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengurus sendiri daerahnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Sumber daya yang ada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung diharapkan dapat dimaksimalkan dalam pengelolaannya. Potensi sumber daya di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung jika dapat dikembangkan serta ditingkatkan, nantinya dapat meningkatkan citra daerah, sehingga PAD dapat meningkat.

Rekapitulasi target dan realisasi PAD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar I.1

**Gambar I.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018**



Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada Gambar I.1 dapat diketahui bahwa selama periode lima tahun dari tahun 2014-2018 PAD Kota Pangkalpinang realisasinya selalu meningkat akan tetapi pada Tahun 2015, 2017, 2018 tidak mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Target dari pemerintah yang terendah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2014 sebesar Rp 111,29 miliar, sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp 113,81 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 102,27 persen. Target tertinggi di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 sebesar Rp 167,19 miliar dengan realisasi sebesar pada tahun 2018 Rp 167,07 miliar serta tingkat realisasinya

99,93 persen. Rata-rata realisasi PAD Kota Pangkalpinang selama lima tahun sebesar Rp 139,86 miliar.

Kabupaten Belitung dalam hal PAD selalu melebihi target pemerintah dan mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Tahun 2014 merupakan penerimaan PAD Kabupaten Belitung terendah dengan target sebesar Rp 60,48 miliar dan realisasi sebesar Rp 72,42 miliar tingkat realisasi pada tahun 2014 sebesar 119,74 persen. Tahun 2018 merupakan pencapaian terget dan realisasi terbesar Kabupaten Belitung dengan target Rp 170,04 miliar dan realisasi Rp 194,08 miliar. Rata-rata realisasi PAD Kabupaten Belitung selama lima tahun sebesar Rp 140,13 miliar.

Gambar I.1 menunjukkan bahwa PAD dari Kota Pangkalpinang selama periode lima tahun Rp 699,30 miliar lebih kecil Rp 1,35 juta daripada Kabupaten Belitung yang mana total PAD selama lima tahun di Kabupaten Belitung Rp 700,65 miliar. PAD di Kabupaten Belitung setiap tahunnya selalu meningkat sedangkan Kota Pangkalpinang berfluktuatif. PAD Kota Pangkalpinang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan beberapa hal salah satunya adalah realisasi sumber PAD yang tidak mencapai target.

PAD mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung sejalan dengan potensi yang dimiliki Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. Semakin tinggi tingkat penerimaan PAD di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung.

Berkembangnya sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang PAD tentunya dibarengi dengan pembangunan tempat-tempat hiburan agar menunjang minat wisatawan untuk berkunjung. Hotel sebagai tempat peristirahatan juga akan dibangun dalam rangka memfasilitasi tempat tinggal wisatawan yang datang berkunjung, sementara itu agar dapat diketahui masyarakat atau wisatawan mengenai tempat pariwisata tersebut pastinya dibuatkan reklame.

PAD didapatkan dari pajak yang diambil pemerintah, yang mana pemerintah memiliki hak dalam hal memungut pajak atau melakukan beberapa usaha agar mendapatkan sejumlah dana untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Pemerintah daerah juga dapat membuat peraturan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan serta berhak mendapatkan dana dari pusat yang berupa transfer (Halim, 2016).

Upaya peningkatan penerimaan PAD dari pajak hiburan di Kota Pangkalpinang sangat sedikit karena pertumbuhannya yang sangat lambat dan tempat hiburan yang disediakan di Kota Pangkalpinang sangat terbatas. Pada tahun 2014-2018 untuk memaksimalkan penerimaan PAD dari sektor hiburan di Kota Pangkalpinang, pemerintah mulai membangun beberapa tempat hiburan baru di Kota Pangkalpinang sehingga para wisatawan yang datang akan mencoba hiburan baru tersebut dan akhirnya PAD dari sektor hiburan sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Pada Kabupaten Belitung penerimaan PAD dari sektor hiburan fluktuatif karena tidak adanya pembangunan tempat hiburan yang baru yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga penerimaan PAD dari sektor

hiburan hanya bersumber dari hiburan-hiburan yang lama sehingga penerimaan PAD kabupaten Belitung untuk sektor hiburan belum maksimal.

**Tabel I.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018**

Tahun	Kota Pangkalpinang		Kabupaten Belitung	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	1.500.000.000,00	1.896.420.240,00	296.492.288,16	366.977.331,00
2015	1.900.000.000,00	1.906.764.303,00	413.100.000,00	462.651.764,53
2016	1.600.000.000,00	1.833.078.460,00	415.600.000,00	456.849.814,40
2017	1.800.000.000,00	2.287.780.148,00	462.000.000,00	620.655.713,55
2018	1.925.000.000,00	2.600.348.528,00	530.000.000,00	672.847.475,79

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel I.1, penerimaan dari sektor hiburan untuk Kota Pangkalpinang berfluktuatif setiap tahunnya. Penerimaan terendah pada tahun 2016 sebesar Rp 1,83 miliar artinya realisasi tahun 2016 sebesar 114,57 persen, Sedangkan tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi dari sektor hiburan di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar Rp 2,6 miliar yang artinya realisasi pada tahun 2018 sebesar 135,08 persen. Pada Kabupaten Belitung penerimaan dari sektor hiburan tidak selalu meningkat karena pada tahun 2016 terjadinya penurunan sebesar Rp 5,8 juta sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 366,97 juta artinya terealisasi sebesar 123,77 persen. Penerimaan tertinggi di Kabupaten Belitung terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 672,84 juta artinya terealisasi sebesar 126,95 persen. Selain hiburan sebagai salah satu upaya pengembangan pariwisata di Provinsi Bangka Belitung, maka hotel dan penginapan sejenisnya juga dibangun serta dimaksimalkan fasilitasnya untuk menunjang wisatawan yang berkunjung. Hal ini juga untuk memaksimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak hotel.

Pertumbuhan usaha hotel atau penginapan di Kota Pangkalpinang dapat dikatakan lambat, sedangkan untuk rumah kos atau rumah kontrakan banyak

masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dan keberatan atas pengenaan pajak rumah kos atau rumah kontrakan tersebut sehingga penerimaan PAD dari pajak hotel belum maksimal. Sedangkan pada Kabupaten Belitung seiring dengan terkenalnya pulau Belitung dari film laskar pelangi tahun 2008 penerimaan PAD dari sektor hotel selalu meningkat. Para wisatawan yang berkunjung ingin mengeksplor Pulau Belitung dengan keindahan yang disediakan. Hal ini pastinya membuat para wisatawan membutuhkan tempat tinggal sementara, sehingga Kabupaten Belitung sebagai kota utama di Pulau Belitung memiliki kesempatan untuk dikunjungi dan disinggahi terlebih dahulu oleh wisatawan yang datang. Secara keseluruhan Penerimaan PAD dari pajak hotel di Kabupaten Belitung lebih baik dari pada Kota Pangkalpinang.

**Tabel I.2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018**

Tahun	Kota Pangkalpinang		Kabupaten Belitung	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	1.400.000.000,00	1.881.001.636,00	2.058.415.729,20	2.293.448.590,00
2015	1.800.000.000,00	2.178.275.295,00	2.801.208.000,00	4.953.931.372,36
2016	2.000.000.000,00	2.564.461.607,00	5.329.464.000,00	7.267.860.473,90
2017	2.000.000.000,00	2.300.899.579,00	6.382.000.000,00	8.545.529.715,77
2018	2.500.000.000,00	3.690.253.301,00	9.011.500.000,00	11.275.358.863,99

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel I.2, penerimaan dari sektor hotel untuk Kota Pangkalpinang fluktuatif karena pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp 263, 56 Juta. Pada tahun 2014 merupakan penerimaan terendah sektor hotel di Kota Pangkalpinang yakni sebesar Rp 1,88 miliar artinya realisasi tahun 2014 sebesar 134,36 persen. Sedangkan tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi dari sektor hotel di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar Rp 3,69 miliar yang artinya realisasi pada tahun 2018 sebesar 147,61 persen. Pada Kabupaten Belitung penerimaan dari sektor hotel selalu meningkat setiap tahun. Penerimaan terendah

terjadi tahun 2014 sebesar Rp 2,29 miliar artinya terealisasi sebesar 111,42 persen, penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 11,27 miliar artinya terealisasi sebesar 125,12 persen. Selain hiburan dan hotel, reklame juga merupakan salah satu penerimaan PAD dari sektor pajak, yang mana reklame dapat digunakan untuk mengiklankan atau mempromosikan tempat-tempat baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal menunjang pariwisata yang disediakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemungutan Pajak Reklame di Kota Pangkalpinang belum maksimal, karena untuk objek pajak reklame yang baru tidak dapat dipungut sebelum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Pangkalpinang. Penerimaan PAD dari sektor reklame di Pangkalpinang lebih tinggi dari pada Kabupaten Belitung karena lebih banyaknya reklame yang terdapat di Kota Pangkalpinang dari pada Kabupaten Belitung.

**Tabel I.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018**

Tahun	Kota Pangkalpinang		Kabupaten Belitung	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	1.500.000.000,00	1.734.528.910,50	1.372.226.840,00	1.570.854.909,00
2015	2.500.000.000,00	2.491.296.704,00	1.373.400.000,00	1.103.719.604,91
2016	2.600.000.000,00	3.448.849.555,00	875.837.000,00	1.186.394.261,18
2017	3.000.000.000,00	4.110.253.399,00	919.000.000,00	1.395.732.238,46
2018	3.400.000.000,00	4.214.707.753,00	920.500.000,00	1.231.383.983,62

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel I.3, Penerimaan dari sektor reklame untuk Kota Pangkalpinang Selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar Rp 1,73 miliar artinya realisasi tahun 2014 sebesar 115,64 persen, Sedangkan tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi dari sektor reklame di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar Rp 4,21 miliar yang artinya realisasi pada tahun 2018



sebesar 123,96 persen. Pada Kabupaten Belitung penerimaan dari sektor reklame tidak selalu meningkat karena pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp 467 juta dan pada tahun 2018 juga terjadi penurunan sebesar Rp 164 juta. penerimaan terendah dari sektor reklame di Kabupaten Belitung terdapat pada tahun 2015 yang tidak mencapai target yakni sebesar Rp 1,10 miliar artinya terealisasi sebesar 80,36 persen sedangkan penerimaan dari sektor reklame tertinggi di Kabupaten Belitung pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 1,57 miliar artinya terealisasi sebesar 114,47 persen.

Berdasarkan Uraian dan Penjelasan sebelumnya penerimaan PAD di Kota Pangkalpinang secara keseluruhan dari tahun 2014-2018 dapat dikatakan lebih rendah dari pada Kabupaten Belitung. Penerimaan pajak daerah dari sektor hiburan di Kota Pangkalpinang dan di Kabupaten Belitung selama lima tahun berfluktuatif. Pada penerimaan dari sektor hotel di Pangkalpinang fluktuatif penerimaannya karena belum maksimal dalam pemungutan, sedangkan di Kabupaten Belitung selalu meningkat sejalan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung. Pada penerimaan dari sektor reklame di Kota Pangkalpinang lebih baik dari pada di Kabupaten Belitung karena ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkalpinang sehingga reklame lebih banyak di pasang di Kota Pangkalpinang.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan dan fenomena yang tertuang pada latar belakang, penulis ingin mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan Laju Pertumbuhan serta Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 yang penulis tuangkan

dalam judul “**Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018?
2. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018?
3. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018?
4. Bagaimana Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018?
5. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018?
6. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018?
7. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018?
8. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018?

9. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018?
10. Bagaimana Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018?
11. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018?
12. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018?
13. Bagaimana Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel serta Pajak Reklame di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan diperlukan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah dapat terarah dan tidak terlalu luas sehingga dapat memberikan pemahaman yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya fokus pada tiga pajak yaitu pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame untuk menentukan seberapa besar pengaruh setiap pajak terhadap PAD.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perhitungan rasio laju pertumbuhan dan kontribusi saja.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisa Laju pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisa Laju pertumbuhan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisa Laju pertumbuhan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018.
6. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang periode 2014-2018.
7. Untuk menganalisa Laju pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018.
8. Untuk menganalisa Laju pertumbuhan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018.
9. Untuk menganalisa Laju pertumbuhan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018.
10. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018.

11. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018.
12. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Belitung periode 2014-2018.
13. Untuk Menganalisa perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel serta Pajak Reklame di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung periode 2014-2018.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan pada mata kuliah manajemen keuangan khususnya tentang laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dalam mengelola keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif pertimbangan bagi Pemerintah atau Instansi terkait dalam menentukan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah gambaran pembahasan secara singkat dari masing-masing bab yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap masalah. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang mendasari dalam analisis penelitian ini, seperti teori Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak daerah dan penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Pada bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu, dan menarik kesimpulan dari topik kedalam kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab III membahas tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab IV membahas tentang sejarah singkat daerah menjadi tempat objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, serta Pajak Reklame terhadap PAD.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab IV membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan tentang gambaran hasil analisis dan saran yang diberikan penulis sebagai bahan masukan pada perusahaan/instansi yang diteliti. Sedangkan kesimpulan dari hasil analisis sebagai pertimbangan manajemen perusahaan/instansi dan memperkaya konsep serta teori bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**